



2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Perhubungan
Kabupaten Sragen



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SRAGEN

EC
UB SBACLAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang merupakan perubahan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen untuk periode tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, yang disusun berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dengan mengakomodasi perubahan dan perkembangan kondisi daerah yang berkaitan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025, serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya guna memberikan dampak yang lebih optimal dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dishub Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Demikian Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun dengan harapan sebagai pedoman dalam menyusun rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan RKA Dishub Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, serta dapat memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh pegawai Dishub Kabupaten Sragen dan sebagai alat kontrol dan tolok ukur dalam pengendalian, evaluasi kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Sragen, 24 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SRAGEN



Raden Suparwoto, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda /IVC

NIP. 19780710 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah	2
1.2 LANDASAN HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	11
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISHUB TRIWULAN II TAHUN 2025.....	11
2.2 CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERBUHUNGAN TAHUN 2024.....	26
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISHUB.....	29
3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN DISHUB	29
BAB IV PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dishub Kabupaten Sragen Periode Pelaksanaan : 2025	12
Tabel 2. 2 Tabel Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2024	27
Tabel 3. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025.....	30
Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	45
Tabel 3. 3 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen sebagai penjabaran tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disingkat Renstra Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025, terdapat penyesuaian terhadap dinamika perkembangan daerah, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.1.1 Pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD. Pengertian Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 1 ayat (30)

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Pasal 13 ayat (2)

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan pengertian tersebut, definisi Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD. Perubahan

Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 tersebut memuat perubahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dishub Kabupaten Sragen yaitu dalam pelaksanaan Urusan Perhubungan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain:

1. Pergeseran kegiatan/subkegiatan dan/atau alokasi beberapa rekening belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 sebagai penyesuaian kebutuhan riil pada tahun 2025;
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/ kegiatan/ subkegiatan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025;

Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi pedoman Dishub Kabupaten Sragen dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA Dishub Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 guna memberikan dampak yang lebih optimal dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.1.2 Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah secara teknis diatur oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam BAB VII TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH Bagian Keenam Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

2. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
3. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Tata cara Perubahan Renja Perangkat Daerah secara teknis diatur dalam Pasal 360 sampai dengan Pasal 368 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
 - a. Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - b. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - c. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:
 - 1) Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - 2) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.
 - d. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - 1) Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - 2) Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - e. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:
 - 1) Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - 2) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
 - 3) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - f. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
 - 3) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - 4) penutup.

- g. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BAPPERIDA untuk diverifikasi.
 - h. Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang terdiri atas:
- a. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
 - b. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam sistematika rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - c. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
 - d. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi.
 - e. Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
 - f. BAPPERIDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - g. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
 - h. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPERIDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
 - i. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - j. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPERIDA.

- k. Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
3. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - a. BAPPERIDA menyampaikan BAPPERIDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - b. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
 - c. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Sragen Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Sragen;
30. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
31. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
32. Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
33. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
34. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025;
35. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.
36. Peraturan Bupati Sragen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025;
38. Peraturan Bupati Nomor Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
39. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya guna pencapaian target kinerja Dishub Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah;
2. Mengakomodasi perubahan dan perkembangan kondisi daerah yang berkaitan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Menjamin kesesuaian antara program kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang disusun dalam Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan Renstra Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
2. Sebagai pedoman rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam menyusun Perubahan RKA Dishub Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025;
3. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil Dishub Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Dishub Kabupaten Sragen; dan
4. Sebagai salah satu upaya perwujudan akuntabilitas kinerja melalui pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub Kabupaten Sragen Tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Dishub Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
	Berisi tentang evaluasi capaian rencana kerja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, dan analisis perubahan kinerja pelayanan Dishub;
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISHUB
	Berisi tentang program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang diinginkan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISHUB TRIWULAN II TAHUN 2025

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sragen, Dishub Kabupaten Sragen pada Tahun 2025 merumuskan 3 (tiga) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan pagu indikatif sejumlah Rp.37.448.761.362 (Tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dishub Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan capaian Renstra Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah di bawah ini.

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dishub Kabupaten Sragen Periode Pelaksanaan : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD: Sampai akhir Juni 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					5	6	7	8	9	10
	2	3	4		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
A		PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	10.207.772.912	40	4.209.154.748	40,00	41,23
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	2	10.000.000	1	4.640.000	50,00	46,40
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	5.000.000	2	3.087.500	66,67	61,75
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	5.000.000	1	1.552.500	50,00	31,05
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	laporan	12	7.489.359.172	6	3.589.590.925	50,00	47,93
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	67	7.489.359.172	67	3.589.590.925	100,00	47,93
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	3.970.800	1	1.845.800	100,00	46,48
	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	Laporan	1	3.970.800	1	1.845.800	100,00	46,48

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	1	2.500.000	1	1.288.000	100,00	51,52
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	2.500.000	1	1.288.000	100,00	51,52
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan	12	284.629.200	6	137.315.650	50,00	48,24
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.242.000	1	1.615.000	50,00	49,81
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	92.211.400	2	49.035.400	50,00	45,89
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.998.000	2	4.299.500	50,00	26,88
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	86.487.800	3	47.460.000	50,00	54,87
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	86.690.000	6	34.905.750	50,00	40,27
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	14.991.000	0	0	0,00	0,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Penunjang Urusan Dinas							
	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	14.991.000	0	0	0,00	0,00
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Dinas	%	100	540.854.000	40	222.761.793	40,00	41,19
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.000.000	1	1.422.000	100,00	71,10
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	229.800.000	18	91.828.293	50,00	39,96
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	309.054.000	6	129.511.500	50,00	41,91
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas	%	100	1.393.113.740	40	251.712.580	40,00	18,07
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	1.003.468.000	9	233.352.580	45,00	23,25
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	329.748.740	0	7.600.000	0,00	2,30

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	59.897.000	5	10.760.000	50,00	17,96
B		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	76.09	27.177.679.850	0	11.807.270.555	0,00	43,44
1		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	80	26.173.210.000	0	11.470.854.264	0,00	43,83
	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	29	583.786.000	0	0	0,00	0,00
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	190	25.589.424.000	90	11.470.854.264	47,37	44,83
2		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal penumpang tipe C dalam kondisi baik	%	66.67	33.070.400	0	0	0,00	0,00
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	4	33.070.400	0	0	0,00	0,00
3		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen ijin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan	Dokumen	512	59.991.000	250	1.687.500	48,83	2,81
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	1	59.991.000	1	1.687.500	100,00	2,81

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
4		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang diuji	%	287	218.497.700	74,63	114.958.991	17,33	52,61
	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	11994	80.528.000	2985	33.470.000	24,89	41,56
	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	6000	74.979.000	2900	72.500.000	48,33	96,69
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	55.605.000	3	5.000.000	33,33	8,99
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	4.440.000	1	1.043.291	100,00	23,50
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	2.945.700	1	2.945.700	100,00	100
5		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah kegiatanpelaksanaan menrek lalu lintas	Kegiatan	7	491.685.000	2	154.110.000	28,57	31,34

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jaringan jalan yang terlaksana							
	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	211.701.000	1	87.190.000	100,00	41,19
	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	108	259.984.000	53	60.320.000	49,07	23,20
	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	1	20.000.000	1	6.600.000	100,00	33,00
6		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi LLAJ di jalan yang terlaksana	Kegiatan	4	38.663.700	1	1.900.000	25,00	4,91
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	1	2.996.000	1	0	100,00	0,00
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	Laporan	1	11.648.000	0	0	0,00	0,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	1	4.950.250	1	1.900.000	100,00	38,38
	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	1	13.414.500	1	0	100,00	0,00
	Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	5.654.950	1	0	100,00	0,00
7		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan barang yang terlaksana	Kegiatan	1	162.562.050	1	63.759.800	100,00	39,22
	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Laporan	1	128.703.250	1	30.125.000	100,00	23,41

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2	33.858.800	2	33.634.800	100,00	99,34
C		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peralatan Keselamatan Kapal	%	33.33	3.536.500	0	0	0,00	0,00
1		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan informasi jaringan lintas penyeberangan serta persetujuan pengoperasian kapal yang terlaksana	Kegiatan	1	3.536.500	0	0	0,00	0,00
	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	3.536.500	0	0	0,00	0,00

Dari tabel di atas dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

Pada tahun 2025, Dishub melaksanakan 3 program, 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 37.448.761.362,00. Untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, capaian sampai akhir triwulan II adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dari anggaran Rp. 5.000.000,00 telah terealisasi Rp. 3.087.500,00 (61,75%) untuk mencukupi kebutuhan alat tulis kantor, kertas dan *cover*, bahan komputer dan makan minum rapat.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dari anggaran Rp. 5.000.000,00 telah terealisasi Rp. 1.552.500,00 (31,05%) untuk mencukupi kebutuhan alat tulis kantor, kertas dan *cover*, bahan komputer dan makan minum rapat. Realisasi masih kecil karena pencairan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dari anggaran Rp. 7.489.359.172,00 telah terealisasi Rp. 3.589.590.925,00 (47,93%), untuk pembayaran gaji dan TPP PNS Dishub sebanyak 62 orang, selama 6 bulan.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Dari anggaran Rp. 3.970.800,00 telah terealisasi Rp. 1.845.800,00 (46,48%) untuk mencukupi kebutuhan alat tulis kantor, kertas dan *cover* dan makan minum rapat.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Dari anggaran Rp. 2.500.000,00 telah terealisasi Rp. 1.288.000,00 (51,52%) untuk mencukupi kebutuhan alat tulis kantor, kertas dan *cover*, makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan penggunaan sistem informasi dan pemutakhiran data kinerja pegawai serta *monitoring* dan evaluasi pegawai terkait presensi dan kedisiplinan pegawai.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dari anggaran Rp. 3.242.000,00 telah terealisasi Rp. 1.615.000,00 (49,81%) untuk mencukupi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dari anggaran Rp. 106.856.400,00 telah terealisasi Rp. 49.035.400,00 (45,89 %) untuk pengadaan ATK, kertas dan *cover*, bahan komputer, pengadaan tablet sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit dan PC sebanyak 1 unit. Pembelian peralatan kantor telah dilaksanakan pada bulan April dan Mei.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dari anggaran Rp. 15.998.000,00 telah terealisasi Rp. 4.299.500,00 (26,88%) untuk penyediaan minum pegawai, makan minum rapat dan penerimaan tamu selama 12 bulan. Realisasi masih kecil karena pencairan disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dari anggaran Rp. 86.487.800,00 telah terealisasi Rp. 47.460.000,00 (54,87%) untuk mencukupi kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dari anggaran Rp. 164.000.000,00 telah terealisasi Rp. 34.905.750,00 (21,28%) untuk belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas. Realisasi masih kecil karena pencairan disesuaikan dengan kebutuhan dan undangan dari instansi lain.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
Dari anggaran Rp. 14.991.000,00 digunakan untuk belanja mebel kursi rapat sebanyak 2 unit. Kegiatan belum ada realisasi karena mebel dalam proses pemesanan dan pengadministrasian keuangan belum dilaksanakan.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Dari anggaran Rp. 2.000.000,00 telah terealisasi Rp. 1.422.000,00 (71,10%) untuk belanja alat tulis kantor, kertas dan *cover*, benda pos dan bahan komputer.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Dari anggaran Rp. 229.800.000,00 telah terealisasi Rp. 91.828.293,00 (39,96%), untuk pembayaran tagihan telepon, air dan listrik sesuai dengan tagihan setiap bulan dan rutin tiap bulan dibayarkan.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Dari anggaran Rp. 616.554.000,00 telah terealisasi Rp. 129.511.500,00 (21,01%), untuk belanja perabot kantor, pembayaran gaji petugas pelayanan di terminal, petugas penjaga kantor, dan petugas kebersihan. Realisasi masih kecil karena pencairan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Dari anggaran Rp. 1.072.368.000,00 telah terealisasi Rp. 233.352.580,00 (21,76%), untuk belanja BBM bus sekolah dan kendaraan dinas, pembayaran petugas pengemudi, pembayaran pajak, dan pemeliharaan kendaraan dinas. Realisasi masih kecil karena kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kerusakan kendaraan.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Dari anggaran Rp. 329.748.740,00 telah terealisasi Rp. 7.600.000,00 (2,30%) untuk pemeliharaan gedung kantor, belanja obat rumput dan rehabilitasi gedung kantor induk. Realisasi masih kecil karena kegiatan dilaksanakan di Triwulan III.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Dari anggaran Rp. 59.897.000,00 telah terealisasi Rp. 10.760.000,00 (17,96%) untuk pemeliharaan *PC*, *printer* dan pemeliharaan *Air Conditioner*. Realisasi masih kecil karena pencairan dilaksanakan sesuai kebutuhan pemeliharaan unit yang telah rusak atau butuh perbaikan.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Dari anggaran Rp. 583.786.000,00 digunakan untuk pengadaan barikade, pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan dan penyambungan listrik alat penerangan jalan. Kegiatan belum ada realisasi karena *refocusing* anggaran dan adanya pemberlakuan sistem e-katalog. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Triwulan III.
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Dari anggaran Rp. 25.589.424.000,00 telah terealisasi Rp. 11.470.854.264,00 (44,83%), untuk pembayaran pajak penerangan jalan umum, pemeliharaan alat penerangan jalan, pemeliharaan APILL, pembayaran gaji tenaga pemelihara perlengkapan jalan dan belanja perjalanan dinas.
2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Dari anggaran Rp. 35.000.000,00 untuk pemeliharaan terminal dan belanja perjalanan dinas. Kegiatan ini belum ada realisasi karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan III.
3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Dari anggaran Rp. 59.991.000,00 telah terealisasi Rp. 1.687.500,00 (2,81%) untuk sosialisasi kepada juru parkir, jasa konsultasi parkir dan belanja perjalanan dinas. Realisasi kegiatan masih kecil karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan ke III.
4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - a. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Dari anggaran Rp. 80.528.000,00 telah terealisasi Rp. 33.470.000,00 (41,56%), untuk belanja alat tulis kantor, kertas dan *cover*, dan pembayaran gaji tenaga registrasi kendaraan wajib uji.
 - b. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dari anggaran Rp. 74.979.000,00 telah terealisasi Rp. 72.500.000,00 (96,69%) untuk kartu bukti lulus uji kendaraan bermotor.

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dari anggaran Rp. 55.605.000,00 telah terealisasi Rp. 5.000.000,00 (8,99%) untuk pemeliharaan genset, kalibrasi alat uji, pemeliharaan alat uji, pemeliharaan SIM PKB dan aplikasi antrian. Realisasi kegiatan masih kecil karena administrasi keuangan masih dalam proses pengerjaan.

d. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dari anggaran Rp. 4.440.000,00 telah terealisasi Rp. 1.043.291,00 (23,50%) untuk rapat koordinasi Pengujian Kendaraan Bermotor se-subosukowonosraten. Realisasi masih kecil karena kegiatan pertemuan penguji se-subosukowonosraten dilaksanakan bulan Mei.

e. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dari anggaran Rp. 3.913.700,00 telah terealisasi Rp. 2.945.700,00 (75,27%) untuk sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor, forum konsultasi publik, laporan survei kepuasan masyarakat dan penyusunan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur. Kegiatan forum konsultasi publik dilaksanakan pada bulan Mei.

5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

a. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Dari anggaran Rp. 221.826.000,00 telah terealisasi Rp. 113.966.000,00 (51,38%), untuk perlengkapan pengaturan dan pengamanan lalu lintas, pembayaran gaji tenaga pengatur dan pengamanan lalu lintas, pembayaran gaji penjaga perlintasan kereta api dan belanja perjalanan dinas.

b. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Dari anggaran Rp. 259.984.000,00 telah terealisasi Rp. 60.320.000,00 (23,20%) untuk pengecatan marka jalan, pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, pengadaan kerucut lalu lintas dan pengadaan *water barrier*. Realisasi masih kecil karena perlengkapan jalan dipasang sesuai kebutuhan.

- c. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 Dari anggaran Rp. 20.000.000,00 telah terealisasi Rp. 6.600.000,00 (33,00%) untuk mencukupi kebutuhan pengumpulan data lalu lintas. Realisasi masih kecil karena pengumpulan data dilaksanakan sesuai kebutuhan data.
- 6. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 Dari anggaran Rp. 5.000.000 untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal. Kegiatan belum ada realisasi karena *refocusing* anggaran.
 - b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 Dari anggaran Rp. 13.000.000,00 untuk mencukupi kebutuhan pemilihan abdi yasa. Kegiatan belum ada realisasi karena seleksi Abdi Yasa atau Pengemudi Teladan Tingkat Kabupaten serta untuk Tingkat Provinsi dilaksanakan Bulan Juli 2025 dan dilaksanakan secara bertahap.
 - c. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 Dari anggaran Rp. 9.698.000,00 telah terealisasi Rp. 1.900.000,00 (19,59%), untuk mencukupi kebutuhan Inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Realisasi masih kecil karena keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum.
 - d. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 Dari anggaran Rp. 16.000.000,00 untuk mencukupi kebutuhan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan jalan. Kegiatan belum ada realisasi karena kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juni.
 - e. Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 Dari anggaran Rp. 11.999.950,00 untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala

kendaraan bermotor. Kegiatan telah terlaksana tetapi belum ada realisasi karena menunggu info *refocusing*.

7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Dari anggaran Rp. 157.547.000,00 telah terealisasi Rp. 30.125.0000,00 (19,12%) untuk mencukupi kebutuhan pengawasan dan pengendalian angkutan umum, belanja perjalanan dinas dan SPPD pengawasan bus sekolah. Realisasi masih kecil karena dokumen pencairan masih dalam proses.
 - b. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dari anggaran Rp. 33.942.800,00 telah terealisasi Rp. 33.634.800,00 (99,09%) untuk mencukupi kebutuhan mudik gratis. Kegiatan mudik gratis telah dilaksanakan pada 25-26 Maret 2025. Kegiatan belum ada realisasi karena masih dalam proses administrasi.

C. Program Pengelolaan Pelayaran

1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dari anggaran Rp. 4.324.000,00 untuk mencukupi kebutuhan kegiatan penyediaan data ASDP dalam kabupaten. Kegiatan belum dilaksanakan dan belum ada realisasi karena masih dalam proses pengadministrasi keuangan.

2.2 CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERBUHUNGAN TAHUN 2024

Visi Kabupaten Sragen periode 2021-2026 adalah **"MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"**. Dalam mewujudkan visi, Kabupaten Sragen memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan;
4. Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-5 yaitu **"Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong"**. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen menyelenggarakan fungsi/uraian tugas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

Tabel 2. 2 Tabel Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Jenis Faktor	Faktor	Tindak Lanjut
Indeks Pelayanan Transportasi	Satuan	0.469	0.469	Pendorong	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal	Peningkatan ketersediaan kebutuhan sarpras perhubungan didukung ketersediaan anggaran
Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	62,06	62,08	Pendorong	Ketersediaan Sarpras perhubungan mencukupi untuk memenuhi jumlah kebutuhan	Peningkatan jumlah sarpras perhubungan

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Jenis Faktor	Faktor	Tindak Lanjut
Predikat kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,40	73,95	105,4	Pemenuhan data dukung Sakip yang baik	Peningkatan nilai Sakip Perangkat Daerah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISHUB

3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN DISHUB

Rencana program dan kegiatan Dishub Tahun 2025, berisi program dan kegiatan, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif), selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD).

Rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh lima) subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dishub Kabupaten Sragen dengan total kebutuhan dana sejumlah Rp37,448,761,362,00 (Tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal dari DAU APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

Untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal, maka dilaksanakan perubahan rencana kerja. Dalam perubahan 2025, disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, dishub terdapat perubahan anggaran sebesar Rp. 315.486.434,00. Secara lebih rinci program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Bertambah / Berkurang	Keterangan	
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
						Dinas Perhubungan													
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2	15	01			PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	10.207.772.912,00	10.207.772.912,00	9.576.027.497,00	-631.745.415,00			
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	7.489.359.172,00	7.489.359.172,00	7.227.143.338,00	-262.215.834,00			

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah / Berkurang	Keterangan	
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Daerah yang Dilaksanakan											
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	333 Orang/b ulan	67 Orang/bul an	62 Orang/bul an	67 Orang/bul an	67 Orang/bul an	7.489.359.172,00	7.489.359.172,00	7.227.143.338,00	-262.215.834,00		
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3.970.800,00	3.970.800,00	3.970.800,00	0,00		
	2	15	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD												
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.970.800,00	3.970.800,00	3.970.800,00	0,00		
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
	2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokume n			1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Bertambah / Berkurang	Keterangan
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	376.584.200,00	376.584.200,00	330.227.200,00	-46.357.000,00		
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	0,00		
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	106.856.400,00	106.856.400,00	112.809.400,00	5.953.000,00		
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	15.998.000,00	15.998.000,00	15.998.000,00	0,00		
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	86.487.800,00	86.487.800,00	86.487.800,00	0,00		
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	164.000.000,00	164.000.000,00	111.690.000,00	-52.310.000,00		

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah / Berkurang	Keterangan
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas	100%		100%	100%	100%	14.991.000,00	14.991.000,00	34.852.000,00	19.861.000,00	
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit			2 Unit	21 Unit	14.991.000,00	14.991.000,00	34.852.000,00	19.861.000,00	
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Dinas	100%	100%	100%	100%	100%	848.354.000,00	848.354.000,00	529.139.500,00	- 319.214.500,00	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	229.800.000,00	229.800.000,00	229.800.000,00	0,00	
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	616.554.000,00	616.554.000,00	297.339.500,00	-319.214.500,00	

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah / Berkurang	Keterangan
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas	100%	100%	100%	100%	100%	1.462.013.740,00	1.462.013.740,00	1.438.194.659,00	-23.819.081,00	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Unit		30 Unit	20 Unit	20 Unit	1.072.368.000,00	1.072.368.000,00	965.968.000,00	-106.400.000,00	
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	329.748.740,00	329.748.740,00	412.329.659,00	82.580.919,00	
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	80 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	59.897.000,00	59.897.000,00	59.897.000,00	0,00	
	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	77%	72.41%	72.41%	76.09%	76.09%	27.236.664.450,00	27.236.664.450,00	27.553.720.931,00	317.056.481,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan	Persentase perlengkapan	80%	79%	79%	80%	80%	26.173.210.000,00	26.173.210.000,00	26.272.384.581,00	99.174.581,00	

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah / Berkurang	Keterangan
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jalan dalam kondisi baik										
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta yang Tersedia	50 Unit	57 Unit	57 Unit	29 Unit	74 Unit	583.786.000,00	583.786.000,00	1.047.500.000,00	463.714.000,00	
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan											
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	946 Unit	190 Unit	357 Unit	50 Unit	50 Unit	25.589.424.000,00	25.589.424.000,00	25.224.884.581,00	-364.539.419,00	
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal penumpang tipe C dalam kondisi baik	66.67%	50%	50%	66.67%	66.67%	35.000.000,00	35.000.000,00	33.070.400,00	-1.929.600,00	
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)											
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit	2 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	33.070.400,00	-1.929.600,00	
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen ijin penyelenggara an parkir yang diterbitkan	2560 Dokume n	512 Dokumen	512 Dokumen	512 Dokumen	512 Dokumen	59.991.000,00	59.991.000,00	191.241.000,00	131.250.000,00	
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59.991.000,00	59.991.000,00	191.241.000,00	131.250.000,00	

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah / Berkurang	Keterangan
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang diuji	97%	281%	281%	287%	287%	219.465.700,00	219.465.700,00	195.068.700,00	-24.397.000,00	
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor											
							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	58979 Unit	11875 Unit	6661 Unit	11642 Unit	11642 Unit	80.528.000,00	80.528.000,00	57.099.000,00	-23.429.000,00	
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	29700 Dokumen	6000 Dokumen	3700 Dokumen	6000 Dokumen	6000 Dokumen	74.979.000,00	74.979.000,00	74.979.000,00	0,00	
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	45 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	55.605.000,00	55.605.000,00	55.605.000,00	0,00	
	2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
							Jumlah Laporan	2 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah / Berkurang	Keterangan
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Koordinasi Penyelenggara an Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara an Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	3.913.700,00	3.913.700,00	2.945.700,00	- 968.000,00	
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan menrek lalu lintas jaringan jalan yang terlaksana	33 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	501.810.000,00	501.810.000,00	593.720.500,00	91.910.500,00	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Ko ta	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	221.826.000,00	221.826.000,00	222.556.500,00	730.500,00	
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas											
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen	71 Unit	70 Unit	70 Unit	55 Unit	55 Unit	259.984.000,00	259.984.000,00	356.164.000,00	96.180.000,00	

NO	Kode					Urusan / Bidang Ururan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah / Berkurang	Keterangan
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan										
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Pro vinsi	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi LLAJ di jalan yang terlaksana	16 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	55.697.950,00	55.697.950,00	38.673.700	-17.024.250,00	
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal											
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.996.000,00	- 2.004.000,00	
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penvelenggara	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	11.648.000,00	- 1.352.000,00	

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah / Berkurang	Keterangan	
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							an Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Ko ta											
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum												
							Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.698.000,00	9.698.000,00	4.950.250,00	- 4.747.750,00		
	2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan												
							Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	16.000.000,00	16.000.000,00	13.414.500,00	- 2.585.500,00		
	2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor												
							Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.999.950,00	11.999.950,00	5.664.950,00	- 6.335.000,00		
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	191.489.800,00	191.489.800,00	229.562.050,00	38.156.250,00		

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah / Berkurang	Keterangan	
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	angkutan barang yang terlaksana											
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota												
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	157.547.000,00	157.547.000,00	195.703.250,00	38.156.250,00		
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	33.942.800,00	33.942.800,00	33.858.800,00	- 84.000,00		
	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peralatan Keselamatan Kapal	37.5%	29.17%	29.17%	33.33%	33.33%	4.324.000,00	4.324.000,00	3.536.500,00	- 787.500,00		
	2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan	Jumlah kegiatan pengumpulan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.324.000,00	4.324.000,00	3.536.500,00	- 787.500,00		

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Tahun 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah / Berkurang	Keterangan
									Target	Capaian	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	data dan informasi jaringan lintas penyeberangan serta persetujuan pengoperasian kapal yang terlaksana										
	2	15	03	2.07	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.324.000,00	4.324.000,00	3.536.500,00	- 787.500,00		

Berdasarkan tabel 3.1, dapat dijelaskan bahwa pada perubahan Tahun 2025 ada 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan yang mengalami perubahan/pergeseran, dari 3 (tiga) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan pada APBD penetapan, dengan total pengurangan anggaran sebesar Rp. 315.486.434,00. Sehingga total anggaran Dishub sebesar RP. 37.133.274.928,00.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp. 7.489.359.172,00 dalam perubahan ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 262.215.834,00 karena ada pegawai yang pensiun sehingga menjadi Rp. 7.227.143.338,00 untuk pembayaran gaji dan TPP PNS Dishub sebanyak 67 orang.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor semula Rp. 106.856.400,00 dalam perubahan ada penambahan sebesar Rp. 5.953.000,00 sehingga menjadi Rp. 112.809.400,00 untuk pengurangan ATK, bahan komputer, pengurangan AC, pengadaan tablet sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit dan PC sebanyak 1 unit, untuk pengadaan *Sound System* dan *Handphone* sebagai admin *driver* untuk mengetahui lokasi bus sekolah.
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula Rp. 164.000.000,00 dalam perubahan ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 52.310.000,00 karena mengurangi acara rapat sehingga menjadi Rp. 111.690.000,00 untuk belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel semula Rp. 14.991.000,00 dalam perubahan ada penambahan sebesar Rp. 19.861.000,00 sehingga menjadi Rp. 34.852.000,00 untuk belanja mebel kursi rapat, meja rapat, rak arsip sebanyak 21 unit.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor semula Rp. 616.554.000,00 dalam perubahan ada pengurangan sebesar Rp. 319.214.500,00 sehingga menjadi Rp. 297.339.500,00 untuk pengurangan kegiatan *Tour de Sragen, Safety riding*, belanja alat dan bahan kebersihan kantor, pembayaran gaji petugas pelayanan di terminal, petugas penjaga kantor, dan petugas kebersihan.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan semula Rp. 1.072.368.000,00 dalam perubahan ada pengurangan sebesar Rp. 106.400.000,00 sehingga menjadi Rp. 965.968.000,00 untuk belanja BBM bus sekolah dan kendaraan dinas, pembayaran pengemudi, pembayaran pajak, dan pemeliharaan kendaraan dinas.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya semula Rp. 329.748.740,00 dalam perubahan ada penambahan sebesar 82.580.919,00 sehingga menjadi Rp. 412.329.659,00 untuk pemeliharaan gedung kantor dan rehabilitasi gedung kantor induk.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota semula Rp. 583.786.000,00 dalam perubahan ada penambahan sebesar Rp. 463.714.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.047.500.000 untuk pengadaan barikade, pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan dan penyambungan listrik alat penerangan jalan.
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan semula Rp. 25.589.424.000,00 dalam perubahan ada pengurangan sebesar Rp. 364.539.419,00 sehingga menjadi Rp. 25.224.884.581,00 untuk pemeliharaan alat penerangan jalan, pemeliharaan APILL, pengadaan *Traffic Light Controller*, pembayaran gaji tenaga pemelihara perlengkapan jalan dan belanja perjalanan dinas.
2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- Kewenangan Kabupaten/Kota semula Rp. 59.991.000,00 dalam perubahan ada penambahan sebesar Rp. 131.250.000,00 sehingga menjadi Rp. 191.241.000,00 untuk jasa konsultasi parkir, belanja perjalanan dinas dan pengadaan seragam juru parkir.
3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - a. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor semula Rp. 80.528.000,00 dalam perubahan ada pengurangan sebesar Rp. 23.429.000,00 sehingga menjadi Rp. 57.099.000,00 untuk pembayaran gaji tenaga registrasi kendaraan wajib uji.
 4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota semula Rp. 221.826.000,00 dalam perubahan ada penambahan sebesar Rp. 730.500,00 sehingga menjadi Rp. 222.556.500,00 untuk perlengkapan pengaturan dan pengamanan lalu lintas, pembayaran gaji tenaga pengatur dan pengamanan lalu lintas, pembayaran gaji penjaga perlintasan kereta api dan belanja perjalanan dinas.
 - b. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas semula Rp. 259.984.000,00 dalam perubahan ada penambahan sebesar Rp. 96.180.000,00 sehingga menjadi Rp. 356.164.000,00 untuk pengecatan marka jalan, pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, pengadaan kerucut lalu lintas dan pengadaan *water barrier*.
 - c. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota semula Rp. 20.000.000,00 dalam perubahan ada pengurangan sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 15.000.000,00 untuk mencukupi kebutuhan pengumpulan data lalu lintas.
 5. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota semula Rp. 157.547.000,00 dalam perubahan ada penambahan sebesar Rp. 38.156.250,00 sehingga menjadi Rp.

195.703.250,00 untuk mencukupi kebutuhan *branding* 6 unit bus sekolah dan aplikasi si Jempol.

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Kondisi Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	57,62	59,08	59,22	61,33	62,06	65,22	66	66
Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	B/ 62,78	B/ 65	BB/ 70,10	BB/ 70,30	BB/ 70,40	BB/ 70,50	BB/ 70,60	BB/ 70,60

Tabel 3. 3 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Tahun						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau		Indeks Pelayanan Transportasi	Indeks	0,468	0,469	0,506	0,518	0,530	0,541	0,553	0,564	0,564
		Sasaran Strategis: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rasio	61,33	62,08	65,22	66,08	66,95	67,81	68,67	69,53	69,53
		Sasaran Penunjang: Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,30	73,95	74,00	73,96	73,98	74,00	74,10	74,15	74,15

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025. Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga diharapkan menjadi acuan, pedoman, dan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub Kabupaten Sragen.

Dokumen Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan visi dan misi daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renja Dishub Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran untuk dapat membantu perbaikan di masa mendatang.

Sragen, 24 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SRAGEN



Raden Suparwoto, STP., M.Si.

Pembina Utama Muda/ IVc

NIP. 19780710 199703 1 001